

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan disimpulkan bahwa keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2018 sampai tahun 2022 tergolong baik jika dilihat dari analisis kewajiban dan ekuitas dana.

1. Pertumbuhan Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 masih aman karena setiap kewajiban yang dimiliki telah dibayarkan dan tidak adanya tunggakan-tunggakan oleh pemerintah setempat. Maka analisis pertumbuhan kewajiban bisa dikatakan baik walaupun selalu berfluktuasi dalam pengelolaan keuangan untuk mengatasi kewajiban yang dimiliki.
2. Rasio kewajiban perkapita Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 menunjukkan penurunan yang signifikan dalam rasio utang per kapita, yang menunjukkan pengelolaan utang yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, tahun 2022 menunjukkan peningkatan tajam yang perlu diwaspadai karena beban utang per kapita meningkat drastis bahwa beban utang yang ditanggung oleh setiap penduduk menjadi sangat besar.
3. Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Rasio ini menunjukkan penurunan pada 2019, mengindikasikan pengelolaan utang yang baik. Namun, peningkatan pada

2020 menunjukkan peningkatan risiko terhadap ekuitas daerah. Meskipun nilai rasio masih dalam batas aman, tren peningkatan ini harus diawasi. Rasio ini menunjukkan penurunan pada tahun 2019, menandakan pengelolaan utang yang baik dan peningkatan ekuitas daerah. Namun, kenaikan pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan risiko, meski masih dalam batas aman.

4. Rasio Kewajiban Terhadap Total Aset Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukan bahwa penurunan rasio pada 2019 aset modal cukup kuat untuk menutupi utang. Namun, peningkatan pada 2022 menunjukkan bahwa utang tumbuh lebih cepat daripada aset modal, mengindikasikan peningkatan risiko keuangan. Ini menunjukkan bahwa Provinsi NTT semakin bergantung pada utang, yang bisa berisiko jika tidak ada peningkatan dalam pengelolaan ekuitas atau pengurangan utang di masa mendatang.
5. Rasio Kewajiban Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur penurunan rasio pada tahun 2019 menunjukkan kemampuan yang baik dalam melunasi utang menggunakan PAD. Namun, peningkatan pada tahun 2020 menandakan bahwa utang menjadi lebih berat terhadap PAD, mengurangi fleksibilitas penggunaan PAD untuk kebutuhan lainnya.
6. Rasio Utang Terhadap Pendapatan Pajak Daerah, rasio ini turun tajam pada tahun 2019, menunjukkan pengelolaan utang yang sangat baik. Namun, peningkatan besar pada tahun 2020 menunjukkan risiko yang

meningkat karena utang menjadi beban lebih besar terhadap pendapatan pajak daerah.

7. Rasio Utang Terhadap Total Pendapatan Daerah penurunan pada tahun 2019 menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik. Namun, kenaikan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa utang menjadi bagian yang signifikan dari total pendapatan daerah. Ini adalah sinyal bahwa provinsi perlu lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangannya untuk memastikan bahwa utang tidak menjadi beban yang terlalu berat pada pendapatan daerah di masa depan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, agar pengelolaan kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Provinsi NTT kedepan semakin lebih baik maka disarankan:

1. Pengelolaan utang yang lebih ketat perlu ada strategi untuk mengurangi utang baru dan mempercepat pembayaran utang yang ada. pengawasan ketat terhadap pengeluaran yang menggunakan utang sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan keuangan daerah.
2. Evaluasi kinerja keuangan secara berkala, evaluasi periodik melakukan evaluasi kinerja keuangan secara berkala dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang relevan.
3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan juga mengendalikan kewajiban dan ekuitasnya dengan baik sehingga setiap tahun pembiayaannya yang ada semakin berkurang.